

NAMA KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL

1. PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dasar Hukum Penyelenggaraan :

- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

2. PELATIHAN STRUKTUR KEPEMIMPINAN

Dasar Hukum Penyelenggaraan :

- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktur Kepemimpinan

NAMA KEGIATAN BIDANG TEKNIS UMUM DAN FUNGSIONAL TAHUN 2024

1. WORKSHOP ADMINISTRASI DIGITAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

Tanggal Pelaksanaan 30 April Tahun 2024

Dasar hukum pelaksanaan Workshop

- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE (Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik)
- UU Pemerintahan Digital Nomor 24 Tahun 2022 tentang E- Governance dan Digitalisasi

2. WORKSHOP MANAJEMEN TALENTA BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Tanggal Pelaksanaan 29 Mei Tahun 2024

Dasar hukum pelaksanaan Workshop

- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- Penyelenggaraan manajemen talenta selanjutnya diatur dalam dua peraturan yang merupakan turunan UU Nomor 5 Tahun 2014, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 (PP Manajemen PNS) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Permen PANRB Manajemen Talenta).

3. WORKSHOP PENYUSUNAN SKP BAGI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

Tanggal Pelaksanaan 25 Juni Tahun 2024

Dasar hukum pelaksanaan Workshop

- Pengaturan mengenai penilaian kinerja dalam Undang-Undang ASN tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, dan penilaian Kinerja pegawai serta mengatur terkait tindak lanjut hasil penilaian kinerja pegawai.

- Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasar kan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya pasal 20 dinyatakan bahwa untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.

4. WORKSHOP TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

Tanggal Pelaksanaan 21 November Tahun 2024

Dasar hukum pelaksanaan Workshop

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

NAMA KEGIATAN BIDANG TEKNIK INTI TAHUN 2024

1. Bimtek Penyusunan SKP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024

Tanggal Pelaksanaan 30 April 2024

Dasar Hukum Penyelenggaraan Bimtek

- UU No.5 Th 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah No.11 Th 2014 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Sipil
- Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Th 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja ASN
- Peraturan Kepala BKN No. 1 Th 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah NO. 46 Th 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ; dan
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Th 2021 Tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Th 2021

2. Workshop Pengawasan Harga Pasar di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota Se- Provinsi Jambi Tahun 2024.

Tanggal Pelaksanaan 04 s/d 05 Maret 2024

Dasar Hukum Penyelenggaraan Workshop

- UU No. 18 Th 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 5360
- UU No. 05 Th 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- UU No. 05 Tahun 07 Th 2014 Tentang Perdagangan (Lembaga Negara RI Th 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran RI
- UU No.23 Th 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No.05 Th 2020 Tentang Sistem Informasi Perdagangan
- Peraturan Presiden No.71 Th 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden No.59 Th 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 71 Th 2015 Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting
- Permendagri No 02 Th 2013 Tentang Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi
- Surat Menteri Dalam Negeri No. 089/2807/SJ Tanggal 12 Juli 2010 Tentang Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan
- Keputusan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting No. 32 Th 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Tahun 2024
- DPA BPSDM Provinsi Jambi Tahun 2024

3. Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024.
Tanggal Pelaksanaan 06 s/d 08 Mei 2024
Dasar Hukum Penyelenggaraan Bimtek

- UU No. 17 Th. 2003 Tentang Keuangan Negara;
- UU No. 25 Th. 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- UU No. 23 Th. 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Instruksi Presiden No. 9 Th. 2000 Tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Th. 2008 Tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- Peraturan Gubernur Jambi No. 19 th. 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- Keputusan Gubernur Jambi No. 781/ KEP.GUB/DP3AP2-2.2/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Jambi;
- Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1016/KEP.GUB/DP3AP2/2020 Tentang Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi Jambi;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;

4. Webinar Pengelolaan Aset Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Jambi Tahun 2024

Tanggal Pelaksanaan Tanggal 07 Oktober 2024

Dasar Hukum Penyelenggaraan Webinar

- UU No. 5 Th. 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- UU No. 6 Th. 2014 Tentang Desa (UU Desa)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Th. 2016 Tentang Pengelolaan Aset Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan No. 111/ PMK.06/ 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN
- DPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Th. Anggaran 2024;

5. Webinar Identitas Kependudukan Digital dan Kemudahan Layanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jambi Tahun 2024.

Tanggal Pelaksanaan 30 September 2024

Dasar Hukum Penyelenggaraan Webinar

- UU No. 23 Th. 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- UU No. 24 Th. 2013 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- UU No. 23 Th. 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Presiden No. 96 Th. 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Th. 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.07 Th. 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Th. 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Th. Anggaran 2024;

6. Webinar Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jambi Tahun 2024

Tanggal Pelaksanaan 28 November 2024

Dasar Hukum Penyelenggaraan Webinar

- UU No. 5 Th. 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- UU No. 24 Th. 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Pemerintah No. 21 Th. 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Instruksi Presiden No. 5 Th. 2022 Tentang Penanggulangan Banjir dan Tanah Longsor
- DPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024